

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, I. (2019). *Manajemen transportasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2012). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Pearson.
- Dewi, R., & Santoso, A. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dipo, P. (2024). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Pekanbaru*. Skripsi.
- Firmansyah, A., & Mahardika, B. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gusnima, D. (2025). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Pangkalpinang*. Skripsi.
- Hamdi. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Handoko, T. H. (2018). *Manajemen* (Edisi 2). Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, S. S., & Amanah. (2018). *Manajemen Organisasi*. Medan: Perdana Publishing.
- Hasibuan, M. S. P. (2020). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadir, A. (2019). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kapioru, C. (2014). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marzuq Tamma, B., Rochaeni, A., & Septiansyah, B. (2025). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal.
- Moenir, H. A. S. (2016). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Mulyadi. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: In Media.
- Munawar, A. (2020). *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Naditya, dkk. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, S., & Subino. (2018). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Pratama. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pribadi, F. M. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi*. Skripsi.
- Purnomo, H., & Santosa, B. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Kencana.
- Rahayu. (2022). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, V., & Sagala, E. J. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rizwan, M. A. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Kota Sukabumi*. Skripsi.
- Schein, E. H. (2018). *Organizational Culture and Leadership*. New Jersey: Wiley.
- Setiadi. (2023). *Pengantar Manajemen Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sinambela, L. P. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solihin, I. (2019). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

- Subarsono, A. G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subkhi, A., & Jauhar, M. (2018). *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sunyoto, D. (2018). *Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CAPS.
- Sutedi, A. (2018). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutopo. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Sutrisno, E. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahida. (2014). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tamin, O. Z. (2019). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung: ITB Press.
- Taufik, & Isril. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Universitas Riau Press.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2014). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Waluyo. (2017). *Manajemen Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Warpani, S. (2018). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB Press.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Yahya. (2017). *Manajemen Organisasi*. Jakarta: Kencana.

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

ANALISIS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS CIGAYAM BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS

No.	Gejala atau peristiwa yang diamati	Aspek/Unsur/ Indikator	Aspek yang dipertanyakan	Informan Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data
1	Implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir	1. Komunikasi,	Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam menyampaikan kebijakan pengelolaan tempat parkir kepada pihak pelaksana dan masyarakat, sehingga tujuan dan aturan kebijakan tersebut dapat dipahami serta dilaksanakan dengan baik?	Kepala Dinas dan pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi	1. Reduksi Data 2. Penyajian Data 3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi Data 4. Triangulasi
		2. Sumber daya,	Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir?			
		3. Disposisi atau	Bagaimana sikap, komitmen,			

		sikap pelaksana, serta	tanggung jawab, dan kepatuhan pelaksana kebijakan dalam menjalankan pengelolaan tempat parkir sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran?			
		4. Struktur birokrasi.	Bagaimana struktur birokrasi, pembagian tugas, standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme koordinasi yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir?			
2	Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir	1. Komunikasi Kebijakan	Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat proses komunikasi kebijakan pengelolaan tempat parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam menyampaikan informasi, aturan, serta tujuan kebijakan kepada pelaksana maupun masyarakat?	Kepala Dinas dan pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi	1. Reduksi Data 2. Penyajian Data 3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi Data 4. Triangulasi
		2. Sumber Daya Pelaksana	Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat ketersediaan serta pemanfaatan sumber daya			

			pelaksana, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran?			
		3. Sikap dan Komitmen Pelaksana	Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat sikap, komitmen, kedisiplinan, serta tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan tempat parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Pangandaran?			
		4. Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat	Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan tempat parkir yang tertib, aman, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan?			
3	Strategi meningkatkan Implementasi Kebijakan	1. Kualitas Komunikasi dan Sosialisasi Kebijakan	Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan pengelolaan tempat	Kepala Dinas dan pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi	1. Reduksi Data 2. Penyajian Data 3. Penarikan Kesimpulan/

	Pengelolaan Tempat Parkir		parkir agar informasi mengenai aturan, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan dapat dipahami serta diterapkan oleh pelaksana dan masyarakat?			Verifikasi Data 4. Triangulasi
		2. Kapasitas Sumber Daya Pelaksana	Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kapasitas sumber daya pelaksana, baik melalui peningkatan kompetensi aparatur, penyediaan sarana prasarana, maupun dukungan anggaran agar implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir dapat berjalan lebih efektif?			
		3. Sistem Pengawasan dan Pengendalian	Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir agar tercipta ketertiban, kepatuhan, dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku?			
		4. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat	Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan			

			partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan parkir serta mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir?			
--	--	--	--	--	--	--

PEDOMAN OBSERVASI

ANALISIS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS CIGAYAM BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS

Nama Informan :

Jabatan :

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Gejala/peristiwa yang diamati	Aspek/Unsur/Indikator	Analisis Hasil Observasi
Implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir	1. Komunikasi, 2. sumber daya, 3. disposisi atau sikap pelaksana, serta 4. struktur birokrasi.	
Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir	1. Komunikasi Kebijakan 2. Sumber Daya Pelaksana 3. Sikap dan Komitmen Pelaksana 4. Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat	

Strategi meningkatkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir	1. Kualitas Komunikasi dan Sosialisasi Kebijakan 2. Kapasitas Sumber Daya Pelaksana 3. Sistem Pengawasan dan Pengendalian 4. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat	
--	--	--

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN

Nama Informan :
Jabatan :
Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

A. Implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam menyampaikan kebijakan pengelolaan tempat parkir kepada pihak pelaksana dan masyarakat, sehingga tujuan dan aturan kebijakan tersebut dapat dipahami serta dilaksanakan dengan baik?
2. Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir?
3. Bagaimana sikap, komitmen, tanggung jawab, dan kepatuhan pelaksana kebijakan dalam menjalankan pengelolaan tempat parkir sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran?
4. Bagaimana struktur birokrasi, pembagian tugas, standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme koordinasi yang diterapkan oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir?

B. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran

1. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat proses komunikasi kebijakan pengelolaan tempat parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam menyampaikan informasi, aturan, serta tujuan kebijakan kepada pelaksana maupun masyarakat?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat ketersediaan serta pemanfaatan sumber daya pelaksana, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran?
3. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat sikap, komitmen, kedisiplinan, serta tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan tempat parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Pangandaran?
4. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan tempat parkir yang tertib, aman, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan?

C. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan pengelolaan tempat parkir agar informasi mengenai aturan, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan dapat dipahami serta diterapkan oleh pelaksana dan masyarakat?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kapasitas sumber daya pelaksana, baik melalui peningkatan kompetensi aparatur, penyediaan sarana prasarana, maupun dukungan anggaran agar implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir dapat berjalan lebih efektif?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir agar tercipta ketertiban, kepatuhan, dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku?
4. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan parkir serta mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir?

Dokumentasi









1. Kepala Terminal Cisaga Ciamis
2. Kasubag TU Pengujian Kendaraan Bermotor(PKB) Pangandaran
3. KUPTD Terminal Pangandaran
4. Kasi Lalulintas DISHUB Pangandaran
5. Kepala Bidang Sarana dan Keselamatan DISHUB Pangandaran